

| | |
|---------------|---|
| Acara | Konferensi PRBBK V |
| Sub Acara | Konferensi Pers |
| Hari, tanggal | Senin, 5 oktober 2009 |
| Pukul | 18.15 – 18.53 WITA |
| Tempat | Lounge cockpit, Hotel Sahid Jaya, Makassar |
| Narasumber | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ir. Sugeng Triutomo, DESS., Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2. Mohammad Roem, Direktur Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Direktorat Jenderal Pemerintah Umum Departemen Dalam Negeri (Depdagri MPPB) 3. Eko Teguh Paripurno, Kepala Pusat Studi Manajemen Bencana (PSMB) Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Yogyakarta 4. Faisal Djalal, Sekretaris Jenderal Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) |
| Notulis | Sitti Rahmawati, PMI Cabang Makassar |
| Editor | Djuni Pristiyanto, MPBI |

**Notulensi Konferensi Pers
Konferensi Nasional PRBBK V
Lounge Cockpit, Hotel Sahid Jaya, Makassar
Senin, 5 Oktober 2009**

Isi Pemaparan/Diskusi Kelompok

Acara dimulai dengan perkenalan

**Ir. Sugeng Triutomo, DESS.,
Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB**

Pertemuan dari para pelaku Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas dari lembaga swadaya masyarakat. Kenapa ini diangkat penting? Adalah ini visi dari penanggulangan bencana. Bagaimana kondisi ini bisa tangguh dari risiko bencana.

Ada beberapa poin dalam diskusi ini :

- Kegiatan-kegiatan upaya yang dilakukan ini berkaitan dengan masalah kebijakan peraturan
- perundangan penanggulangan bencana.
- Regulasi peraturan perundangan?
- Bagaimana membangun institusinya?

Saat ini dari 33 provinsi sudah ada 13 provinsi yang sudah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

- Menjelaskan tentang keberadaan lembaga ini dan menjelaskan bagaimana regulasi penanggulangan bencana yang baik dan benar.
- Bagaimana upaya meningkatkan penanggulangan bencana Indonesia.
- *Setelah sedikit perkenalan kemudian menjelaskan kembali tentang bagaimana penanggulangan bencana ini.*

Sekarang ini banyak terjadi bencana dengan karakteristik bencana, maka perlunya:

- Mengenal risiko ancaman bencana,
- Pemerintah daerah itu harus menyusun dan menetapkan dan menyebarluaskan peta rawan bencana dimana hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan keikutsertaan para akademisi dan institusi turut serta dalam risiko penanggulangan bencana ini.

Tanya jawab dengan media:

Jurnal Nasional

- Memberi masukan waktu pelaksanaan press konferensi.
- Kendala teknis risiko bencana seperti akses jembatan, apa saja kendala-kendal dalam hal ini?

Jawab Pak Sugeng

Mengetahui bagaimana peran komunitas, adanya pencegahan sehingga risiko dari bencana dapat dikurangi, aspek komunitas, karena jika terjadi bencana maka komunitas yang paling menderita, banyak sekali dukungan-dukungan ke depan untuk mengurangi bencana, dalam hal ini bagaimana bertindak cepat dalam mengurangi risiko bencana.

SUN TT Makassar

Bagaimana eksistensi badan nasional penanggulangan bencana itu sendiri sebenarnya?

Jawab Eko Teguh Paripurno

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sudah baik, jika kita lihat struktur BNPB bertugas dalam hal darurat. Jika masyarakat mampu memahami ancaman maka risiko bencana sebelumnya akan mampu dikurangi. Pertanyaan adalah apakah masyarakat di kawasan rawan gempa mampu memahami ancaman risiko bencana? Yang jadi permasalahan adalah kecenderungan kita ketika ada bencana namun lupa bagaimana keadaan pasca bencana tersebut. Masalahnya apakah Makassar mampu memahami ragam ancaman yang ada di wilayah ini? Seperti halnya kita perlu pelajari ancaman di Bendungan Bili-bili Kabupaten Gowa. Maka kita perlu banyak belajar ancaman yang ada agar mampu mengurangi risiko bencana. Contoh lainnya kita lihat bangunan di padang seperti apa?, apakah bangunan 2004. Sarannya adalah mensinergiskan adanya ancaman risiko bencana.

Tanya

Jika kita lihat Peraturan Pemerintah (PP) 41 jika tidak salah. Bagaimana BNPB.....

Tanggapan tambahan dari Pak Sugeng (BNPB)

Amanat Undang-Undang yaitu BNPB di tingkat nasional dan daerah bekerja di tiap sektornya masing inilah mensinkronkan amanat Undang-undang Penanggulangan Bencana 2007. Dalam Undang-undang ini hanya menjelaskan peran BNPB namun bagaimana peranan lembaga lain?. Jadi intinya dalam hal penanggulangan ini bukan saja BNPB saja yang bertanggung jawab dalam hal menanggulangi risiko bencana yang ada tapi perlunya kerjasama lembaga lain dalam kata lain siap siaga.

Apa artinya siap siaga? yaitu mengenali ancaman yang akan muncul, lalu bagaimana cara mencegah antara ancaman dan kerentanan. contoh jangan membangun rumah di daerah patahan termasuk dalam usaha untuk mencegah, lalu mengurangi (mitigasi) contoh mendirikan bangunan yang tahan

dengan gempa 7 skala richter di daerah gempa 5 skala richter sebagai salah satu usaha mengurangi bencana.

Muh. Roem, Depdagri

Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang banyak mengatur sehingga semuanya bisa tertata dengan baik. Jadi untuk di depan biarkanlah pemerintah yang bekerja dulu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai langkah awal. Dan pemerintah mengharapkan juga peran masyarakat untuk mendukung kerja pemerintah.

Tanya (Wartawan Fajar TV)

1. Kenapa Makassar menjadi orientasi konferensi.
2. Pemerintah berencana untuk membentuk peta rawan bencana seperti yang dikatakan Gubernur Sulsel, kapan dilaksanakan
3. Menyarankan visualisasi kepada media dalam hal penanggulangan bencana
4. Kenapa dalam Konferensi ini para gubernur tidak diundang dalam forum ini?

Jawab Pak Sugeng

1. Telah diputuskan dalam rapat PRBBK di Bali 2008 bahwa pelaksanaan konferensi ini di Makassar jadi dilaksanakan di Makassar.
2. Sejak tahun 2007 dalam Undang-undang Penanggulangan Bencana April 2007 telah dijelaskan tentang membuat peta rawan bencana.
3. Telah dibentuk Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana, yang salah satu anggotanya berasal dari unsur media
4. Jadi biarlah dari hasil berbagi ini kemudian disampaikan kepada gubernur.

Udi, Jangkar Bumi:

Saya sepakat bahwa penanganan bencana dilaksanakan secara komprehensif antara masyarakat dan pemerintah. Jika dibentuk badan kemudian anggaran bencana diberikan kepada siapa?

Jawab Pak Roem

Dari 33 propinsi yang telah membentuk BPBD, Makassar belum termasuk.